

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Surono, 2013. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*, Ind Hill. Co, Jakarta.
- _____, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bappenas, 2015. *Strategi Reformasi Regulasi Nasional*, Bappenas, Jakarta.
- Gautama Budi Arundhati dkk., (editor), 2017. *Proseding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4*, UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Hans Kelsen, 1995. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu hukum Empirik-Deskriptif*, (Alih Bahasa Soemardi), Rimbi Press, Jakarta.
- Irmansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Peneluisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm hlm. 214-215.
- _____, 2014. *Konstitusi & Konstisusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- _____, 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang.
- Maria Farida Indrati, S, 2019. *Ilmu Perundang-Undangan Buku 1*, Kanisius, Jakarta, Cetakan Ke-21.

_____, 2019. *Ilmu Perundang-Undangan Buku 2*, Kanisius, Jakarta, Cetakan Ke-21.

Mahkamah Konstitusi, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku IV Jilid 2, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, Jakarta.

PSHK, 2019. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Indonesia: Proseding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi*, YSHK, Jakarta.

Salim HS dan Eerlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

Disertasi/Laporan Penelitian

A.Hamid. S. Attamimi, 1990. “Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1990.

BPHN, 2010. *Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, BPHN, Jakarta.

BPHN, 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, BPHN, Jakarta.

Ni Luh Gede Astariyani, 2017. “Delegasi Pengaturan Kepada Peraturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan dan Keadilan”, *Disertasi*, (Bab I dan Bab II), Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Udayana.

Suwoto, 1990. “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia”, *Disertasi*, Fakultas Pasca Sarjana Unair, Surabaya, 1990, hlm. 76-77.

Jurnal/Artikel

Bayu Dwi Anggono, 2018. “Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari.

- E. Prajwalita Widiati Dan Haidar Adam, 2012. “Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah, *Yuridika*: Volume 27 No 1, Januari-April.
- Fitriani Ahlan Sjarif, 2017. “Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember.
- Muhammad Takbir, 2020. “Analisis Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Minimarket Berjaringan Di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, [Http://Repository. Unmuh-jember.Ac.Id/141/](http://Repository.Unmuh-jember.Ac.Id/141/).
- Nindya Chairunnisa Zahra dan Sony Maulana Sikumbang, 2021. “Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan”, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-10/S58379-Nindya%20Chairunnisa%20Zahrariyadi>,
- Petrus Kadek Suherman, 2017. “Delegasi Regulasi Dan Simplifikasi Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah, *Jurnal Advokasi*, Vol 7 No 1.
- Saldi Isra, 2017. “Merampingkan Regulasi”, *Kompas*, 20 Maret.
- Soedarsono, 2017. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung, *Mimbar Yustitia*, Vol. 1 No.2 Desember.
- Sumarfa dkk, 2019. “Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1 Issue 3, December.
- Supriarno dkk., 2019. “Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD”, *Jurnal Riset dan Konseptual*, Volume 4 Nomor 3, Agustus.
- Sylvia Ariani, 2017. “Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm. 155.

Victor Imanuel, 2013. “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakankedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Judisial*, Vol 6 No. 1.

_____, 2016. “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1).

Yusdianto, 2012. “Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda dan Peraturan Lainnya”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 3 Sept.-Desember.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/14/11042401/kode-keras-jokowi-agar-pemerintah-daerah-permudah-investasi?page=all>, diakses tanggal 1 Oktober 2020.

<https://kbbi.web.id/atur>, diakses tanggal 3 Oktober 2020.

<https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses tanggal 3 Oktober 2020.

<https://kbbi.web.id/blangko>, diakses tanggal 26 April 2021.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/312758/peraturan-delegasi-di-indonesia-ide-untuk-membangun-kontrol-preventif-terhadap-peraturan-pemerintah>, diakses 10 Januari November 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7878/maria-farida-tanpa-penge-sahan-presiden-uu-tidak-berlaku?page=all>, diakses tanggal 8 Mei 2021.

<http://dprd-jambiprov.go.id/berita/detail/126/dprd-gelar-paripurna-ke-sepakatan-propemperda-2018/>

<https://jamberita.com/read/2018/11/19/5757/ini-7-ranperda-yang-diajukan-fachrori-ke-dprd-provinsi-jambi/>, diakses Maret 2021.

https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses 14 Februari 2021.

<https://www.google.com/search?q=hasil+fasilitasi+kementerian+keuangan+atas+Raperda+Provinsi+Jawa+Tengah+Tahun+2019+tentang+Retribusi+Daerah>, disakses tanggal 30 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-unadangan;

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2019.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019.

Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Jambi Tahun 2018-2019.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2019.